

## Tantangan Perekonomian dan Penyehatan Fiskal Tahun 2017

**A**RAH kebijakan ekonomi USA di bawah rezim presiden terpilih Donald Trump dapat dipastikan cenderung protektif, model kebijakan seperti ini akan meropotkan banyak negara mitra dagangan USA. Dikarenakan USA setidaknya menguasai perekonomian dunia sekitar 16,2 persen diukur dari paritas daya beli (*purchasing power parity*), negara terkaya dunia dan investor dunia banyak yang berasal dari negeri Paman Sam tersebut. Kebijakan fiskal yang ditawarkan oleh Trump akan menerapkan fiskal ekspansif, tarif pajak korporasi diturunkan dengan sendirinya terjadi defisit anggaran. Pembiayaan defisit tentu mereka akan menarik utang lewat penjualan *global bond*, jika ini terjadi maka *global bond* yang ditawarkan oleh negara lain termasuk Indonesia kurang "seksi". Diprediksi dollar akan mengalir deras ke USA, dan sebagian dollar tersebut pulang kampung karena *global bond* USA menarik, disaat yang bersamaan suku bunga *the fed* akan dinaikkan, sehingga akan menyulitkan likuiditas mata uang domestik Indonesia mendorong terjadinya depresiasi rupiah.

Disaat yang bersamaan harga komoditas (CPO, karet, batu bara, nikel) di pasar dunia belum pulih benar, meskipun mulai merangkak naik. Ekspor komoditas merupakan salah satu andalan Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Belum lagi sebagian negara *emerging market*, seperti Brazil masih menghadapi turbulensi ekonomi, China mengalami perlambatan, Rusia masih tambah negatif sekaligus menghadapi resiko gejolak politik karena keterlibatan perang saudara di Suriah serta ketegangan dengan negara barat lainnya termasuk USA, demikian halnya Turki diperhadapkan dengan gejolak perang di Suriah, sebagian besar pengungsi Suriah ditampung oleh

Turki yang membutuhkan pembiayaan. Satu-satunya negara *emerging market* yang mengalami kestabilan adalah India.

Di tengah situasi seperti itu, *global bond* Indonesia yang mulai di tawarkan awal tahun 2017 menjadi sangat riskan dan kemungkinan tidak terlalu laku. Di waktu yang bersamaan target penerimaan pajak juga belum optimal di tahun 2016, dalam APBN-P 2016 target penerimaan pajak sebesar Rp. 1,355 triliun, per 30 November 2016 penerimaan pajak baru mencapai sebesar Rp. 965 triliun (71 %) kemungkinan *shortfall* tahun ini masih besar. Itu semua akan menjadi tantangan perekonomian Indonesia, jika ini benar terjadi maka tahun 2017 pemerintah dipastikan akan melakukan percepatan revisi anggaran, tidak menutup kemungkinan kembali dilakukan pemangkasan anggaran untuk K/L dan dana transfer. Dampaknya tentu saja pembangunan proyek-proyek strategis di daerah kembali tertunda. Harapannya uang tebusan dari *tax amnesty* pada periode ketiga dapat dioptimalkan, selain diperlukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan dari pajak, sehingga kekuatiran itu tidak muncul karena defisit tidak terlalu melebar.

Jika bercermin pada tahun 2016 (triwulan ketiga) sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran komponen konsumsi rumah tangga pertumbuhannya tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya sebesar 2,70 persen, diikuti komponen pembentukan modal tidak tetap 1,30 persen sementara komponen pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor negatif. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi, sekaligus menyumbang terhadap pembentukan perekonomian mencapai 55,32 persen. Diharapkan pada tahun 2017 komponen konsumsi rumah tangga tetap stabil dengan

Oleh :  
**Muh. Amier Arham**

catatan pengendalian inflasi sangat diperlukan hingga ke daerah. Sekalipun ini tentunya kurang ideal, *investment driven* yang lebih dibutuhkan untuk mengungkit perekonomian, bukan didominasi *consumption driven*.

### Upaya Penyehatan Fiskal:

Di tengah situasi perekonomian yang beragam tantangan, agaknya pilihan kebijakan pun terbatas, karena itu pentingnya terus melakukan upaya perbaikan penyehatan fiskal, diantaranya memperlebar ruang fiskal. Selama ini ruang fiskal cukup terbatas, terlebih di daerah. Sempitnya ruang fiskal menyulitkan pemerintah melakukan terobosan dan percepatan pembangunan, karena lebih dari separuh anggaran sudah terkunci untuk kegiatan rutin dan pembiayaan sektor pendidikan 20 persen, kesehatan 5 persen. Ditambah penyerapan anggaran masih cenderung mirip polanya tahun-tahun sebelumnya kerap terlambat dan menumpuk diakhir tahun, terkesan sekedar mengejar menghabiskan anggaran tanpa memikirkan dampak ekonominya.

Selain itu perbaikan sasaran subsidi energi dan listrik tentu perlu didukung, kebijakan ini telah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun 2016, tetapi tidak berjalan karena ketidaksiapan PLN melakukan pendataan pelanggan listrik yang tidak lagi layak menerima subsidi. Saat ini subsidi listrik mencapai Rp. 45,0 triliun diberikan kepada 19,1 juta dengan daya R-1/450 VA dan 4,05 juta dengan R-1/900 VA. Untuk pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 900 VA, tarif akan disesuaikan secara bertahap tiga kali per dua bulan. Demikian halnya subsidi LPG Tabung 3 Kg mencapai Rp.

32,3 triliun dilakukan dengan pola distribusi tertutup/*targeted (by name and by address)* sebab selama ini tabung 3 Kg seharusnya ditujukan kepada 26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 2,3 juta usaha mikro, namun orang kategori mampu lebih banyak yang membeli tabung gas melon.

Pengurangan subsidi energi dan listrik dari Rp. 94,4 triliun pada tahun 2016 menurun menjadi Rp. 77,3 triliun tentu dibarengi dengan peningkatan pembiayaan subsidi pangan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. APBN 2017 memberikan penguatan kualitas belanja untuk melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur, kenaikan disektor ini cukup signifikan dari Rp. 317 triliun di tahun 2016 naik menjadi Rp. 387 triliun. Agar akselerasi pembangunan infrastruktur dapat tercapai, belanja infrastruktur bukan hanya diperkuat pada belanja K/L tetapi juga di daerah, karena itu UU APBN 2017 terbilang cukup progresif salah satu klausulnya mensyaratkan bahwa pemanfaatan DAU yang diserahkan ke daerah wajib mengalokasikan minimal 25 persen untuk pembiayaan infrastruktur. Adanya penegasan seperti itu merupakan bentuk "intervensi" pemerintah pusat agar DAU yang sifatnya *block grant* tidak semata-mata dimanfaatkan oleh daerah, seperti selama ini pemanfaatan DAU kebanyakan bukan untuk sektor-sektor *utilities* (kepentingan publik), lebih banyak dihabiskan untuk belanja yang tidak produktif, perjalanan dinas dan studi banding berombong.

Kebijakan ini ditempuh sebagai bentuk sinkronisasi kinerja belanja pemerintah pusat dan daerah, karena DAU dan dana transfer lainnya setiap tahun terus mengalami peningkatan, demikian juga sumber pendapatan sendiri, sehingga belanja pemerintah daerah pun naik. Berbagai hasil kajian

menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah di daerah kurang signifikan mempengaruhi target pembangunan, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Hal ini terjadi karena lemahnya perencanaan penganggaran di daerah sehingga berdampak terhadap kualitas belanja. Ini tidak terlepas karena pembahasan anggaran cenderung lebih politis dan tertutup, hanya dibahas oleh eksekutif dan legislatif, keterlibatan pihak ketiga tentu saja tidak ada ruang untuk memberikan masukan sebagai upaya perbaikan kualitas belanja. Biasanya pihak ketiga termasuk kalangan perguruan tinggi dilibatkan hanya pada pembahasan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menentukan arah kebijakan pemerintah daerah satu tahun berikutnya.

Perlu dipikirkan kedepannya untuk menentukan arah kebijakan fiskal daerah dan pembahasan anggaran pihak perguruan tinggi dalam hal ini para ekonom diberikan akses memberikan masukan untuk perbaikan kualitas belanja daerah, termasuk melakukan analisis keterkaitan APBD terhadap capaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Jika ditingkat pusat analisis makroekonomi dan arah kebijakan fiskal ditangani oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, di daerahpun sebetulnya bisa dibuat lembaga (*tim advisor*) di bawah komando Bappeda. Tapi itu semua terpulung kepada pemerintah daerah dan legislatif, apakah merasa membutuhkan atau tidak? tapi ini ujian bagi mereka adakah komitmen untuk melakukan penyehatan fiskal agar APBD lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. *Walahua lam.*

\*Penulis adalah Pengajar Fakultas Ekonomi UNG dan Ekonom Kementerian Keuangan